

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025**



**KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. Raya Sukodadi Nomor 92B

Email : sukodadi@lamongankab.go.id

website: www.lamongankab.go.id

SUKODADI 62253

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan PD Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2025, Rencana Kerja Perubahan ini disusun berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029, Serta Surat Edaran Bupati Lamongan, Nomor 050/ 195/ 413.204/ 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Menyadari akan keterbatasan kami dalam menyusun laporan ini yang masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya, dan kami akan berupaya terus untuk menyempurnakan laporan berikut pelaksanaannya.

Demikian Laporan Rencana Kerja Perubahan PD Kecamatan Sukodadi Tahun 2025 dan mudah – mudahan bermanfaat.

Sukodadi, Juli 2025



KAMAT SUKODADI

SMAUN, SH.,M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19670902 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2	Landasan Hukum 2
1.3	Maksud dan Tujuan..... 4
1.4	Sistematika Penulisan..... 5
BAB.II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024
2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2024 Capaian Renstra PD..... 10
2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Lamongan..... 10
2.2	Analisa Kinerja Pelayanan PD..... 27
2.2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD..... 27
2.3	Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.... 30
2.4	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 33
BAB.III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 36
3.2	Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2024..... 37
3.3	Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2024..... 39
BAB.IV	PENUTUP..... 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 PD Kecamatan Sukodadi yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan PD Kecamatan Sukodadi, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan PD yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 PD Kecamatan Sukodadi dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 PD Kecamatan Sukodadi memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Sukodadi serta kerangka pendanaan daerah, Renja PD Kecamatan

Sukodadi secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda PD dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra PD) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan .
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya .
5. Pendekatan Bottom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Bottom – Up diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Sukodadi Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

1.2.Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukodadi Tahun 2022 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286)
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Frencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan.

- 10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lamongan.
- 12) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026
- 13) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 14) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025.
- 15) Surat Edaran Bupati Lamongan, Nomor 050/ 195/ 413.204/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud :

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Sukodadi Tahun 2025 berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program - program, kebijakan - kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan.

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip

GOOD GOVERNANCE.

Tujuan :

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Sukodadi tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2025 yang sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Sukodadi .**Bab. I Pendahuluan .**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja PD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang :

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja PD, Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Dasar Hukum Penyusunan :

Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan :

Memuat penjelasan tentang pertimbangan apa yang menjadi dasar dan acuan dari penyusunan Renja Perubahan PD.

1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan Renja :

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab. II EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD.

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-1 atau 2024) dan capaian tahun berjalan (2025) yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun - tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu, dan realisasi Renstra PD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan / atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing PD, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja.

Jika PD bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional /internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dan.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari PD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada PD Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan perubahan nasional dan provinsi, khususnya penelaahan yang menyangkut perubahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

Penyusunan program dan kegiatan PD yang di rencanakan dalam Perubahan Renja PD mengacu pada:

- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
- Peraturan Kepala PD tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026
- Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 maupun Renja PD Tahun 2025
- SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
- Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020

- Target Indikator Strategis Daerah / Provinsi / Nasional yang tertuang dalam SDG's, Rencana Aksi Daerah (RAD), Nota Kesepakatan Daerah (MOU), Indikator Kinerja Utama Provinsi. Dan bab ini berisikan penjelasan narasi mengenai :
 - a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan program dan kegiatan, diantaranya terkait dengan
 - a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - b) Pencapaian SDGs;
 - c) Pengentasan Kemiskinan;
 - d) Pencapaian NSPK dan SPM;
 - e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 - f) Pengembangan daerah terisolir, dsb
 - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan;
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (bisa tersebar ke berbagai kecamatan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
 - c) Pelaksanaan Hibah/BK/Bansos disajikan dalam tabel tersendiri;
 - d) Total kebutuhan dana/pagu indicator yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD Tahun 2024, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab. IV Penutup.

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a) Kesimpulan
- b) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

- b) Kaidah – kaidah pelaksanaan.
- c) Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD

Perangkat Daerah Kecamatan Sukodadi telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2025), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024, dan realisasi renstra PD Kecamatan Sukodadi yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan antara lain :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Program dan kegiatan tahun 2024 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan. Bahkan Nilai IKM melampaui target yang ditetapkan. Desa Naik Kelas juga naik 20 %, sesuai yang ditargetkan, Desa yang naik kelas mencapai target, yaitu sebesar 4 Desa Naik Kelas

2. Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah :

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Realisasi
1					2	3	4	5
7	0	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	83,26	83,38

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Realisasi
1					2	3	4	5
7	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%
7	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang selaras	3 Dokume n	3 Dokume n
7	0 1	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi	4 Laporan	4 Laporan
7	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Gaji	12 Laporan	12 Laporan
7	0 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	12 Laporan
7	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	100%	100%
7	0 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket
7	0 1	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket
7	0 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis
7	0 1	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokume n	1 Dokume n

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Realisasi
1					2	3	4	5
7	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat dan konsultasi yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%
7	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	3 Unit
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	100%	100%
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 Orang/ Bulan	16 Orang/ Bulan
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Realisasi
1					2	3	4	5
7	0 1	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehab gedung yang dilaksanakan	1 Unit	1 Unit
7	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	100%	100%
7	0 1	0 2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	100%	100%
7	0 1	0 2	2.0 2	0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan
7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%
7	0 1	0 3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, sosial dan Pembangunan wilayah	100%	100%
7	0 1	0 3	2.0 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	77 Lembaga	77 Lembaga
7	0 1	0 3	2.0 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	20 Laporan

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Realisasi
1					2	3	4	5
7	0	0	2.0		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Desa	20 Desa
7	0	0	2.0	0	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Desa yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Desa	20 Desa
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang Tertangani	100%	100%
7	0	0	7.0		Koodinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20 Desa	20 Desa
7	0	0	7.0	0	Jumlah Desa yang Melakukan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonsia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20 Desa	20 Desa
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%
7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum	12 Rapat	12 Rapat
7	0	0	2.0	0	Jumlah Desa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 Orang	70 Orang

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Realisasi
1					2	3	4	5
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	20 %	20%
7	0	0	2.0		Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	20 Desa	20 Desa
7	0	0	2.0	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Laporan	12 Laporan
7	0	0	2.0	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa	12 Laporan	12 Laporan
7	0	0	2.0	0	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Laporan	12 Laporan
7	0	0	2.0	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	12 Laporan	12 Laporan

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah tidak ada, dikarenakan semua kinerja 6 program tercapai 100 %.

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan,
Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala

dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2025, ada faktor internal, yakni kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing – masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM (Personil) di Kecamatan Sukodadi.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.
Target capaian program Renstra tahun 2021 – 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).
 - Tertatanya tujuan dan sasaran pada setiap pembangunan dengan baik.
 - Tertatanya administrasi kependudukan dengan baik.
 - Meningkatnya Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa.
 - Meningkatnya peran serta kepemudaan dibidang olah raga dan seni budaya sehingga pada tahun 2024 dan 2025 mendapatkan beberapa prestasi baik ditingkat Kecamatan, maupun Kabupaten.
 - Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, ditingkatkannya para Usaha warung di tepi / atas sungai, Para Pengusaha Industri sudah banyak yang memiliki Ijin Usaha.
 - Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, dan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor
 - Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Jembatan dan Jalan Poros Desa, Jalan – jalan Dusun, Kantor Desa / Balai Desa dan jalan lingkungan Rt.
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah.
Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf .

Adapun evaluasi hasil realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja OPD Kecamatan Sukodadi sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah :

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang direalisasikan oleh Kecamatan Sukodadi pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp. 2.390.236.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.217.013.654,- atau 92,75 %. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dengan alokasi anggaran Rp.29.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.618.000,- atau 98,68%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerjanya adalah Persentase Aparatur Yang Disiplin Dengan alokasi anggaran Rp 1.611.400.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 1.471.062.311,-atau 91,29%.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk kelancaran dan terlaksananya kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah Dengan alokasi anggaran Rp 114.513.500,- dan terealisasi sebesar Rp 108.915.950,- atau 95,11 %.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran Rp 20.337.880,- dan terealisasi sebesar Rp 20.250.000,- atau 99,57%.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan dengan alokasi anggaran Rp 436.636.000,- dan terealisasi Rp 418.998.593,- atau 95,96 %.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Dengan alokasi anggaran Rp 59.156.120,- dan terealisasi sebesar Rp 53.074.300,- atau 89,72 %.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang direalisasikan oleh Kecamatan Sukodadi dalam rangka kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.902.000,- atau 99,02 % rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan Indikator Kinerjanya adalah Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu, Dengan alokasi sebesar Rp 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.902.000,- atau 99,02 %

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang direalisasikan oleh Kecamatan Sukodadi dalam rangka kegiatan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp. 46.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.164.500,- atau 96,01 % Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk terlaksananya kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Indikator Kinerjanya adalah Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat Dengan alokasi anggaran Rp. 24.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 22.273.500,-- atau 92,81 %.

b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Indikator Kinerjanya adalah Jumlah Desa yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, Dengan alokasi anggaran Rp. 22.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.891.000,- atau 99,50 %.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direalisasikan oleh Kecamatan Sukodadi dalam rangka kegiatan dari Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp. 1.192.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.146.500,-

atau 96,14 % Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Kinerjanya adalah Presentase Konflik yang tertangani, Dengan alokasi anggaran Rp. 1.192.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.146.500,- atau 96,14 %

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direalisasikan oleh Kecamatan Sukodadi dalam rangka Kegiatan Dari Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.760.000,- atau 99,20 % Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Indikator Kinerjanya adalah Jumlah Desa yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan, Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.760.000,- atau 99,20 %

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direalisasikan oleh Kecamatan Sukodadi dalam rangka kegiatan dari Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada

tahun 2024 dengan alokasi anggaran (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp. 32.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.121.500,- atau 97,96 % Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk terlaksananya kegiatan Koordinasi Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerjanya adalah Persentase Desa Naik Kelas, Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.121.500,- atau 97,96 %

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Sukodadi

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai an Kinerj a RPJM D Tahun 2024	Realis asi Capaia n Kinerj a RKPD s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (S.d tribulan 1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Tribulan 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		PD Penanggun gjaw
2					3	4	5	6	7		8		9 = 8/7x100 %		10 = 6+8		11 = 10/ 5 x 100 %		12
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	83,26	83,38	83,76	2.223.171740	-	491.954.676	-	22,11 %	83,26	2.100.919.154	100,14	92,51 %	Kec. Sukodadi
7	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100	14.000.000	100	0	100	0	100%	28.618.000	100	98,68 %	Kec. Sukodadi
7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Gaji	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	1.823.376.940	12 Lapora n	379.526.673	12 Lapora n	20,81 %	12 Lapora n	20.250.000	100 %	91,29%	Kec. Sukodadi
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Unit Kerja Internal yang Terlayani	100%	100%	100%	71.826.500	100%	0	100%	0 %	100%	108.915.950	100%	95,11%	Kec. Sukodadi

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Sukodadi

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai an Kinerj a RPJM D Tahun 2024	Realis asi Capaia n Kinerj a RKPD s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (S.d tribulan 1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Tribulan 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		PD Penanggun gjava
2					3	4	5	6	7		8		9 = 8/7x100 %		10 = 6+8		11 = 10/ 5 x 100 %		12
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						dengan Baik													
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	100%	20.250.000	100%	99,57%	
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik	100%	100%	100%	290.438.000	100%	112.428.003	100%	0 %	100%	418.998.593	100%	95,96%	
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%	23.530.300	0	0	0%	0 %	100%	53.074.300	100%	89,72%	

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Sukodadi

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai an Kinerj a RPJM D Tahun 2024	Realis asi Capai an Kinerj a RKPD s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (S.d tribulan 1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Tribulan 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		PD Penanggun gjava
2					3	4	5	6	7		8		9 = 8/7x100 %		10 = 6+8		11 = 10/ 5 x 100 %		12
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penyelenggara an Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	100%	100%	100 %	4.500.000	0	0	0%	0 %	100%	9.902.000	100%	99,02%	
7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kec	Presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	100%	100%	100 %	4.500.000	0	0	0%	0 %	100%	9.902.000	100%	99,02 %	
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	100 %	21.134.000	0	0	0%	0 %	100%	44.164.500	100%	96,01%	

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Sukodadi

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai an Kinerj a RPJM D Tahun 2024	Realis asi Capaia n Kinerj a RKPD s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (S.d tribulan 1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Tribulan 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		PD Penanggun gjaw
2					3	4	5	6	7		8		9 = 8/7x100 %		10 = 6+8		11 = 10/ 5 x 100 %		12
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	2.0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, sosial dan Pembangunan wilayah	100%	100%	100 %	7.000.000	0	0	0%	0 %	100%	22.273.500	100%	92,81%	
7	0	0	2.0		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100%	100%	100 %	14.134.000	0	0	0%	0 %	100%	21.891.000	100%	99,50%	

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Sukodadi

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai an Kinerj a RPJM D Tahun 2024	Realis asi Capaia n Kinerj a RKPD s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (S.d tribulan 1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Tribulan 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		PD Penanggun gjava
2					3	4	5	6	7		8		9 = 8/7x100 %		10 = 6+8		11 = 10/ 5 x 100 %		12
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang Tertangani	100%	100%	100 %	2.459.500	0	0	0%	0 %	100%	1.146.500	100%	96,14%	
7	0	0	7.0		Koodinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Koordinasi	20	20	20	2.459.500	20	0	20	20	100 %	1.146.500	100%	96,14%	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggaraka n	100%	100%	100 %	1.557.000	0	0	0%	0 %	100%	29.760.000	100%	99,20 %	

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Sukodadi

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai an Kinerj a RPJM D Tahun 2024	Realis asi Capaia n Kinerj a RKPD s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (S.d tribulan 1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Tribulan 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		PD Penanggun gjaw
2					3	4	5	6	7		8		9 = 8/7x100 %		10 = 6+8		11 = 10/ 5 x 100 %		12
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100 %	1.557.000	0	0	0%	0 %	100%	29.760.000	100%	99,20 %	
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	20 %	20 %	20 %	19.902.000	0	0	0%	0 %	20 %	31.121.500	20%	97,25%	
7	0	0	2.0		Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	20 %	20 %	20 %	19.902.000	0	0	0%	0 %	20 %	31.121.500	20%	97,25%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Dalam mencapai kinerja pelayanan PD Kecamatan Sukodadi tahun 2024, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan Sukodadi merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Sukodadi.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan

No	Indikator Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah		Nilai IKM	82,26	82,76	83,26	83,76	82,39	82,86	83,38	83,76	84,26	
			Nilai SAKIP Kecamatan	92,52	82,62	82,72	83,82	83,85	83,97	83,86	84,01	84,03	
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa		Jumlah Desa Maju	6 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	6 Desa	12 Desa	8 Desa	7 Desa	5 Desa	
			Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Prosentase Desa yang melaksanakan Pemberdayaan terhadap masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Prosentase Desa Naik Kelas	10%	15%	20%	25%	55%	40%	20 %	20 %	20 %	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Sukodadi adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Sukodadi dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Sukodadi.
 - a. Terbatasnya jumlah personil yang sesuai kompetensi di Kecamatan Sukodadi sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Sukodadi .
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Sukodadi hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan,
 - d. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan;
 - e. Beban kerja untuk memenuhi standard maksimal pelayanan public belum sebanding dengan jumlah personil dan SDM aparatur Kecamatan Sukodadi serta belum sepenuhnya didukung oleh prasarana yang representative
 - f. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).

SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun

2024. SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Gambar 2.1 18 Tujuan dan Sasaran Pembangunan melalui SDGs Desa

Mengutip dari Permendesa 13/2020 setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan

12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa.

Dampaknya terhadap pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*), Pendamping desa pada Kecamatan Sukodadi telah melakukan pendataan. Ada beberapa sasaran pembangunan melalui SDGs Desa di Sukodadi yang telah dilaksanakan, diantaranya:

Dampaknya terhadap pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*), Pendamping desa pada Kecamatan Sukodadi telah melakukan pendataan. Ada beberapa sasaran pembangunan melalui SDGs Desa di Sukodadi yang telah dilaksanakan, diantaranya:

1. Program Bebas Stunting sesuai dengan sasaran pembangunan SDGs Desa, yaitu: tujuan ke-3 “Desa Sehat dan Sejahtera” dan tujuan ke- 5 “Keterlibatan Perempuan Desa”
2. BUMDES sesuai dengan sasaran pembangunan SDGs Desa, yaitu: tujuan ke-8 “Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata”
3. Desa tanpa Kesenjangan sesuai dengan sasaran pembangunan SDGs Desa, yaitu: tujuan ke-10 “Desa Tanpa Kesenjangan

4. Penanaman Bambu di Waduk Rancangkencono, Dusun Dorogede, Kec. Sukodadi sesuai dengan sasaran pembangunan SDGs Desa, yaitu: tujuan ke-15 “Desa Lingkungan Darat”.
5. Gerakan Penanaman 100 Pohon pada Hari Asri Desa Nusantara di Desa Sidogembul sesuai dengan sasaran SDGs Desa, yaitu tujuan ke-15 “Desa Lingkungan Darat”.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan ;
- b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan ;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;
- d. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;
- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
- d. Melakukan perbaikan sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Sukodadi terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

1. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2.4 Penelahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

- a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.
- b. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Kecamatan
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan dan seluruh Desa yang ada.
 1. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu - isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Sukodadi adalah :
Perangkat Daerah Kecamatan Sukodadi melalui Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat; dan Kasi Pemerintahan selaku koordinator pelaksana Kecamatan dalam menangani kegiatan ADD, DD, Bagi Hasil Pajak, dan BKKPD.
 2. Menyajikan Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Sukodadi-Kabupaten Lamongan

Nama PD : Kecamatan Sukodadi

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Propinsi

1. Prioritas Nasional :

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan,
 - b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
 - c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,
 - d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
 - e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
 - f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
 - g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:
- a. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
 - b. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas,
 - c. pengembangan transisi energi,
 - d. percepatan infrastruktur IKN,
 - e. reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

2. Prioritas Provinsi :

- a. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial
- b. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi
- c. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan
- d. Pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu & berkeadilan

- e. Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas
 - f. Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan
 - g. Pembangunan Ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa
 - h. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi
 - i. Menjaga harmoni sosial & alam dengan melestarikan kebudayaan & lingkungan hidup
3. Prioritas Kabupaten Lamongan :
- a. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi yang adil dan merata
 - b. Penguatan kualitas dan kuantitas produksi komoditas unggulan, UMKM dan kemudahan akses terhadap pasar elektronik maupun non elektronik
 - c. Penguatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja yang berdaya saing berskala regional
 - d. Peningkatan kualitas infrastruktur perekonomian, ruang publik dan infrastruktur dasar serta optimalisasi infrastruktur kawasan industri baru dan realisasi ringroad utara
 - e. Peningkatan stabilitas dan kondusifitas sosial

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sukodadi tahun 2025

Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sukodadi. Adapun tujuan dan sasaran SKPD Kecamatan Sukodadi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1). Tujuan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dibidang administrasi Umum, Perlengkapan, Kerumah tanggaan, Kelembagaan, Kehumasan, Kepegawaian, Keuangan dan Urusan Program. Meningkatkan presentase kehadiran aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dibidang administrasi Umum, Perlengkapan, Kerumah tanggaan, Kelembagaan, Kehumasan, Kepegawaian, Keuangan dan Urusan Program Meningkatkan presentase kehadiran aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran.

2). Tujuan Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Meningkatkan cakupan sarana dan prasarana pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang tercukupi dengan baik sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat dapat meningkat terhadap kualitas pelayanan Kecamatan.

Sasaran

Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang tercukupi dengan baik sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat dapat meningkat terhadap kualitas pelayanan Kecamatan.

3). Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan. Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dibidang ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi sumber daya alam (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Peternakan) bina usaha (Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Budaya dan Pariwisata, Perhubungan dan Penanaman Modal) Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup ;

Sasaran

Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan. Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dibidang ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi sumber daya alam (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Peternakan) bina usaha (Industri,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Budaya dan Pariwisata, Perhubungan dan Penanaman Modal) Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup ;

4.) Tujuan Program Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa

Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, memfasilitasi administrasi tata pemerintah desa, pengelolaan keuangan pendayagunaan aset daerah, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan desa, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Sasaran

Meningkatkannya koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, memfasilitasi administrasi tata pemerintah desa, pengelolaan keuangan pendayagunaan aset daerah, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan desa, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Dari uraian tersebut diatas, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukodadi Tahun 2025 ini dijadikan sebagai Pedoman Kegiatan SKPD Kecamatan Sukodadi dalam menentukan arah yang dicapai pada Tahun 2025, dan sebagai bahan evaluasi kerja untuk penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dijabarkan melalui Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

3.3 Perubahan Program Kegiatan Kecamatan Sukodadi Tahun 2025

Penyusunan perubahan program dan kegiatan PD yang direncanakan dalam Renja PD mengacu pada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
- b. Peraluran Kepala PD tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026

- c. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 maupun Renja PD Tahun 2022
- d. SPM (standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
- e. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
- f. Target indikator strategis daerah / provinsi / nasional yang tertuang dalam SDG's, Rencana Aksi Daerah (RAD), Nota Kesepakatan Daerah (MoU), Indikator Kinerja Utama Provinsi.

Tabel Perubahan Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
 - 1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah :
Rumusan Program dan Kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah Kecamatan Sukodadi terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah
 - 2. Target Indikator strategis yang digunakan terhadap rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan SDG's.
 - 3. Dalam rumusan program dan kegiatan berorientasi terhadap pengentasan kemiskinan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :
 - 1. Jumlah Program sebanyak 6 Program dan jumlah Kegiatan sebanyak 13 kegiatan .
 - 2. Lokasi program dan kegiatan di Kecamatan Sukodadi
 - 3. Total kebutuhan dana / pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah :
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya,
- d. Menyajikan Tabel 3.1 Sebagaimana berikut :

Tabel 3.1 Perbandingan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

Nama PD: Kecamatan Sukodadi

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM	84,00	Nilai IKM	84,00	Kec. Sukodadi	Kec. Sukodadi	2.272.724.240	2.174.897.300	(97.826.940)	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	7 Dokumen	Kec. Sukodadi	Kec. Sukodadi	14.000.000	14.000.000	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	Kec. Sukodadi	Kec. Sukodadi	1.823.376.940	1.725.550.000	(97.826.940)	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum	12 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum	12 Laporan	Kec. Sukodadi	Kec. Sukodadi	71.826.500	71.826.500	-	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	Kec. Sukodadi	Kec. Sukodadi	290.438.000	290.438.000	-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	Kec. Sukodadi	Kec. Sukodadi	23.530.300	23.530.300	-	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	100 %	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	100 %	Kec. Sukodadi	Kec. Sukodadi	4.500.000	4.500.000	-	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Jenis	Jumlah Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Jenis	Kec. Sukodadi	Kec. Sukodadi	4.500.000	4.500.000	-	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100 %	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100 %	Kec. Sukodadi	Kec. Sukodadi	21.134.000	21.134.000	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kec. Sukodadi	Kec. Sukodadi	7.000.000	7.000.000	-	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Desa	Kec. Sukodadi	Kec. Sukodadi	14.134.000	14.134.000	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	100 %	Persentase Konflik yang tertangani	100 %	Kec. Sukodadi	Kec. Sukodadi	2.459.500	2.459.500	-	
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Koordinasi	20 Desa	Jumlah Desa Koordinasi	20 Desa	Kec. Sukodadi	Kec. Sukodadi	2.459.500	2.459.500	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100 %	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100 %	Kec. Sukodadi	Kec. Sukodadi	1.557.000	1.557.000	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100 %	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100 %	Kec. Sukodadi	Kec. Sukodadi	1.557.000	1.557.000	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Naik Kelas	20 %	Presentase Desa Naik Kelas	20 %	Kec. Sukodadi	Kec. Sukodadi	19.902.000	19.902.000	-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100 %	Presentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Pembangunan Wilayah	100 %	Kec. Sukodadi	Kec. Sukodadi	19.902.000	19.902.000	-	
Belanja Total								2.272.724.240	2.174.897.300	(97.826.940)	

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Perangkat Daerah Kecamatan Sukodadi pada Tahun 2025 menetapkan 6 Program, dan 13 Kegiatan, yang diharapkan pada akhir tahun dapat mencapai target-target yang ditetapkan, agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal. Selama berjalan Tribulan I Tahun 2025, Target berjalan sesuai direncanakan meskipun ada kendala berkaitan dengan ketersediaan dana, namun hal tersebut dapat diusulkan melalui PAK tahun berjalan agar target sesuai yang direncanakan sehingga pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2025 ini dapat dilaksanakan secara maksimal.

b. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD Kecamatan Sukodadi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan Sukodadi merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .



KAMAT SUKODADI

ISMAUN, SH.,M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19670902 198903 1 005